

**PUNCAK PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT PADA  
MASA PEMERINTAHAN GUBERNUR AZWAR ANAS TAHUN 1977-1988**

**SKRIPSI**

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Strata Satu 1 (S1) Pada Program Studi Pendidikan Sejarah***



**Oleh:**

**ANGGY SYAFITRA**

**16046057**

**PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN SRKISPI**

**PUNCAK PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT PADA MASA  
PEMERINTAHAN GUBERNUR AZWAR ANAS TAHUN 1977-1988**

Nama : Anggy Syafitra  
BP/NIM : 2016/16046057  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Jurusan : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2021

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Rusdi, M.Hum

NIP. 1940315 199203 1 002

Pembimbing



Drs. Etmi Hardi, M.Hum

NIP. 196703041993031003

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertabangkan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada Hari Kamis, 21 Oktober 2020  
"Puncak Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pemerintahan  
Gubernur Azwar Anas tahun 1977-1988"

Nama : Anggy Syafitra  
BP/NIM : 2016/16046057  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Jurusan : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 4 Januari 2021

### Tim Penguji

Ketua : Drs. Etmi Hardi, M.Hum  
Anggota : 1. Hendra Naldi, SS, M.Hum  
2. Drs. Zul Asri, M.Hum

### Tanda Tangan

1.   
2.   
3. 

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggy Syafitra  
BP/NIM : 2016/16046057  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Jurusan : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul **“PUNCAK PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT PADA MASA PEMERINTAHAN GUBERNUR AZWAR ANAS TAHUN 1977-1988”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa langsung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Januari 2021

Diketahui Oleh

Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Rusdi, M.Hum

NIP.19640315 199203 1 002

Saya Menyatakan



Anggy Syafitra

NIM. 16046057/2016

## ABSTRAK

Anggy Syafitra 2016/16046057. Puncak Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pemerintahan Gubernur Azwar Anas tahun 1977-1988. **Skripsi**. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2020.

Skripsi ini mengkaji tentang cara dan strategi Azwar Anas (1977-1988) dalam memimpin dan membangun daerah Provinsi Sumatera Barat di Era Orde Baru. Sentral permasalahannya adalah program Azwar Anas dalam membangun dan memimpin Sumatera Barat dalam membangun dan memimpin masyarakat Sumatera Barat yang dulu luluh lantak akibat trauma PRRI. Kajian ini dilatar belakangi oleh keadaan Provinsi Sumatera Barat yang tahun 1960-an daerah ini terjadi pergolakan dan masyarakat merasakan trauma akibat peristiwa tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah memberikan gambaran tentang kondisi Sumatera Barat sebelum Azwar Anas menjabat, cara Gubernur Azwar Anas membangun dan memimpin Sumatera barat, serta dampaknya bagi masyarakat Sumatera Barat.

Skripsi ini memakai metode penelitian kualitatif, jenis penelitian sejarah. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang dilakukan melalui tahap heuristic, kritik sumber, analisa dan interpretasi, terakhir dilaporkan dalam bentuk skripsi.

Dari hasil temuan penulis dalam rangka membangun dan memimpin masyarakat Sumatera Barat yang jatuh setelah pergolakan, Azwar Anas menyusun pola dasar pembangunan Sumatera Barat. Azwar Anas melakukan reorganisasi pemerintahan daerah dengan mengangkat tiga pembantu Gubernur dan jorong dijadikan desa. Pembangunan desa di Sumatera Barat dilakukan dengan cara terpadu dengan sistem gotong royong yang mana partisipasi masyarakat dibutuhkan. Sumatera Barat menjadi pelaksana MTQ Nasional XIII merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat, dan dibuatnya acara tahunan yang sangat penting bagi kultural Minangkabau yaitu Pekan Budaya. Kondisi puncak Sumatera Barat mendapatkan kebanggaan dan harga diri yang terangkatkan ialah menjadi satu-satunya provinsi di luar pulau jawa yang menerima penghargaan provinsi terbaik dalam pelaksanaan pembangunan dengan menerima Piagam Parasamya Purnakarya Nugraha. Hal tersebut merupakan moment resmi berakhirnya secara definitif proses pasifikasi masyarakat Sumatera Barat pasca-PRRI dan terbukanya era baru bagi Provinsi Sumatera Barat untuk memulai masa depan yang cerah dalam segala aspek.

**Kata kunci:** *Pembangunan, Orde Baru, pemimpin, kebijakan.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Puncak Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pemerintahan Gubernur Azwar Anas tahun 1977-1988**”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata 1 (S1) Universitas Negeri Padang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang sangat luar biasa. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Etmi Hardi, M.Hum sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan, kritik dan saran serta motivasi yang sangat besar dalam penyusunan skripsi ini.
2. Drs. Zul Asri, M.Hum dan Hendra Naldi, SS, M.Hum, serta Najmi, SS, M.Hum selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran.
3. Dr. Rusdi, M.Hum dan Drs. Etmi Hardi, M.Hum selaku ketua dan sekretaris jurusan sejarah FIS UNP yang telah memberikan semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi secepatnya.
4. Dekan Fakultas ilmu sosial Universita Negeri Padang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Penulisan skripsi ini telah peneliti lakukan dengan semaksimal mungkin. Namun tidak luput dari kesalahan. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan

saran dari pembaca untuk dapat membangun peneliti krarah yang lebih baik kedepannya. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Padang, Oktober 2020

Anggy Syafitra

NIM. 16046057

## DAFTAR ISI

|                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ABSTRAK .....                                                                                      | i      |
| KATA PENGANTAR .....                                                                               | ii     |
| <u>DAFTAR ISI</u> .....                                                                            | iv     |
| <u>BAB I PENDAHULUAN</u> .....                                                                     |        |
| <u>A.Latar Belakang Masalah</u> .....                                                              | 1      |
| <u>B.Batasan dan Rumusan Masalah</u> .....                                                         | 9      |
| <u>C.Tujuan dan Manfaat Penelitian</u> .....                                                       | 10     |
| <u>D.Tinjauan Pustaka</u> .....                                                                    | 11     |
| <u>E.Metode Penelitian</u> .....                                                                   | 18     |
| <br><u>BAB II POTRET SUMATERA BARAT SEBELUM PEMERINTAHAN AZWAR</u><br><u>ANAS</u> .....            | <br>22 |
| <u>A.Sumatera Barat Dalam Panggung Sejarah</u> .....                                               | 22     |
| <u>B.Peristiwa PRRI dan Dampaknya</u> .....                                                        | 30     |
| <u>C.Kepemimpinan Sumatera Barat Setelah PRRI</u> .....                                            | 39     |
| 1. <u>Kaharudin Datuk Rangkyo Basa (1961-1965)</u> .....                                           | 40     |
| 2. <u>Harun Zain (1967-1977)</u> .....                                                             | 42     |
| <br><u>BAB III PERIODE KEPEMIMPINAN AZWAR ANAS SEBAGAI GUBERNUR</u><br><u>SUMATERA BARAT</u> ..... | <br>44 |
| <u>A.Sekilas Tentang Azwar Anas</u> .....                                                          | 44     |
| <u>B.Azwar Anas Sebagai Pengganti Harun Zain</u> .....                                             | 48     |



|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>C. Program Azwar Anas Dalam Memimpin dan Membangun Sumatera Barat .</u>       |    |
| <u>1.Menyusun Pola Dasar Pembangunan .....</u>                                   | 53 |
| <u>2.Reorganisasi Pemerintahan Daerah .....</u>                                  | 57 |
| <u>3.Dari Abri Masuk Desa Hingga Manunggal Sakato .....</u>                      | 62 |
| <u>4. Pembangunan Sosial Budaya .....</u>                                        | 75 |
| <br><u>D. Dampak Program Azwar Anas Terhadap Pembangunan Sumatera Barat ....</u> |    |
| <u>1. Anugerah Parasamya Purnakarya Nugraha .....</u>                            | 81 |
| <u>2. Diperhatikan Oleh Pusat .....</u>                                          | 84 |
| <br><u>BAB IV KESIMPULAN .....</u>                                               | 92 |
| <br><u>DAFTAR PUSTAKA .....</u>                                                  | 94 |
| <br><u>LAMPIRAN.....</u>                                                         | 99 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang Masalah**

Sejarah Provinsi Sumatera barat berawal dari setelah Indonesia Merdeka tahun 1945 Wilayah Sumatera dijadikan Sebuah Provinsi yang dibagi menjadi 10 Keresidenan, Salah satunya Keresidenan Sumatera Barat.<sup>1</sup> Pada Bulan April 1948 Dikeluarkanlah UU No. 10/1948 tentang pembagian Sumatera menjadi Tiga Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Serta Sumatera Selatan. Sumatera Barat termasuk kedalam keresidenan dari Provinsi Sumatera Tengah. Provinsi Sumatera Tengah Ditunjuk Moh. Nasrun sebagai Gubernur Sumatera Tengah pada saat itu.<sup>2</sup>

Pada Tanggal 20 Desember 1956 di Bukittinggi Terjadi pengalihan pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Ruslan Muljoharjo kepada Ahmad Husein.<sup>3</sup> Pada tahun 1957 Provinsi Sumatera Tengah Dibubarkan dengan UU Darurat No. 19/1957 UU Karena didesak oleh Dewan Banteng dan pada saat itu Dewan Banteng Mendeklarasikan PRRI Melalui UU tentang pemekaran Sumatera Tengah Melalui UU No,61 Tahun 1958, tentang pemekaran Sumatera Tengah menjadi Sumatera Barat, Riau Jambi.

---

<sup>1</sup> Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007),17

<sup>2</sup> Ibid. hal 18

<sup>3</sup> Ibid. hal 231

Sumatera Barat merupakan provinsi yang pernah menjadi basis dari sebuah pemberontakan yaitu PRRI atau dikenal Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958 sampai 1961. Pemberontakan identik dengan kekerasan, dan kekerasan merupakan salah satu ciri dari sebuah perang dan tidak ada yang membawa kebaikan. Peristiwa PRRI memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat Sumatera Barat. Setelah pemberontakan PRRI resmi berakhir, PRRI menyimpan pengalaman buruk atau trauma yang dialami oleh masyarakat Sumatera Barat, contohnya pelaku maupun rakyat kebanyakan cenderung untuk tidak berbicara banyak tentang situasi peristiwa PRRI. Mereka terpaksa mengikuti arus, bagaimana yang dialirkan oleh pemerintah, bahkan ada pula rakyat yang mengganti namanya dengan nama Jawa.<sup>4</sup> serta terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain, termasuk ke pulau Jawa. Hal tersebut sebagai wujud ketakutan terhadap tekanan pemerintah pada pelaku dan pendukung PRRI.

Peristiwa PRRI 1958-1961 telah memporak-porandakan kehidupan sosial politik, ekonomi dan budaya daerah dan telah menimbulkan guncangan kultural dengan memukul kebanggaan dan rasa percaya diri orang Minangkabau yang telah tumbuh subur dalam waktu sebelumnya.<sup>5</sup> Yang mana Minangkabau Telah Melahirkan Tokoh-tokoh nasional yang menjadi pejuang Kemerdekaan dan Penggerak kehidupan di Nusantara. Sampai pertengahan abad ke-20, prestasi masyarakat Minangkabau dalam menyumbangkan elite intelektual nasional sangat

---

<sup>4</sup> Letkol. Purn. Sjoeb, *“Era Eksperimen Politik dari soekarno 1956-1966, Makalah Seminar. Sehari “Peringatan 50 tahun Hubungan Indonesia-Amerika Serikat”*, Di Universitas Indonesia, Depok, Jakarta, 27 Oktober 1998

<sup>5</sup> Mestika.Zed, Edy Utama, Hasril Chaniago, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998. Hal 157

menonjol. Lebih dari 3 persen elite nasional berasal dari masyarakat Minangkabau, dan 12 persen menteri-menteri kabinet pada dasawarsa pertama kemerdekaan Indonesia juga berasal dari Minangkabau. Serta sembilan dari 15 penulis utama Balai Pustaka yang berperan dalam pembangunan bahasa nasional juga putra Minangkabau. Posisi inilah yang mendorong rasa percaya diri dan kebanggaan, bahwa orang Minangkabau dapat tampil dan berperan secara nasional.<sup>6</sup>

Setelah Pemerintah Pusat menumpas pemberontakan PRRI, secara langsung telah menghantam perasaan rasa percaya diri dan kebanggaan yang dimiliki selama ini. Kekalahan yang diderita membuat masyarakat Minangkabau merasa malu, terhina dan tertekan karena kalah. Hal tersebut menguburkan keberadaan orang Minangkabau secara umum. Seperti sebagian besar masyarakat menyembunyikan identitasnya sebagai orang minang.<sup>7</sup>

Dampak tragis akibat PRRI tampaknya memberikan pengaruh terhadap perubahan yang terjadi di Sumatera Barat. Ada yang mengatakan banyak orang Minangkabau sekarang tidak lagi memperlihatkan warna keminangkabauannya, dan kaum intelektual tidak lagi diperhitungkan dalam kehidupan elite di tingkat nasional.<sup>8</sup> Peristiwa PRRI membuat masyarakat baik yang di kampung maupun di rantau membekas dalam, dan menjadi traumatik. Trauma itu membuat masyarakat Minangkabau tertekan secara psikologis beberapa dekade.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 159

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 160-161

<sup>8</sup> Pernyataan Abdurahman Wahid, Pada tahun 1988 di Harian Umum Singgalang, Padang.

Berbagai upaya untuk mengembalikan harga diri dan kebanggaan masyarakat Minangkabau telah dilakukan oleh tokoh-tokoh minang baik yang berada di kampung maupun yang berada diperantauan. Seperti adanya pertemuan informal komunitas masyarakat Minang di Jakarta yang berdiskusi serius tentang situasi di Sumatera Barat yang porak poranda pasca PRRI.<sup>9</sup> Selain itu masyarakat Minang yang berada diperantauan yang terpanggil hatinya untuk membangun kembali Sumatera Barat. Sebut saja Harun Zain yang Pulang untuk membenahi Universitas Andalas yang kampus-kampusnya hancur, dan para mahasiswa yang berkurang dan seperti anak ayam yang kehilangan induk pasca PRRI (1958-1961).

Sebagai Gubernur Sumatera Barat Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa (1958-1965) mempunyai tugas pokok mengaktifkan dan membentuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan melakukan Pasifikasi Paska-PRRI. Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa mulai melakukan normalisasi di daerah Sumatera Barat . Strategi yang dilakukan Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa untuk menormalisasikan Provinsi Sumatera Barat adalah merangkul para Tungku Tigo Sajarangan, dan memanggil para pegawai agar kembali bertugas untuk mengisi pos-pos atau jawatan yang kosong karena disebabkan oleh peristiwa PRRI. Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa juga membuka kembali sekolah-sekolah dan kampus untuk siswa dan mahasiswa agar bisa belajar kembali dan mulai mengaktifkan kegiatan pertanian dan perdagangan rakyat yang mengalami gangguan akibat peristiwa PRRI.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abrar Yusra .Azwar Anas: Teladan dari ranah minang, hal 98

<sup>10</sup> Hasris Chaniago, Khairul Jasmi. Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa: Gubernur Di Tengah Pergolakan. Hal. 290 dan Limbo karsyah. Dari Gubernur M.Nasroen Sampai Zainal Bakar. Hal. 23-24

Empat tahun berselang tepatnya pada tahun 1966 ditunjuklah Harun zain sebagai gubernur Sumatera Barat tahun 1966-1977.<sup>11</sup> Pada masa orde baru atau pemerintahan Soeharto masyarakat Minangkabau mulai merehabilitas diri. Pada saat itu Sumatera Barat dipimpin seorang Gubernur Harun Zain (1966-1977) yang memerintah dengan motto: *Mambangkik batang tarandam*. Pada saat itu masyarakat Minangkabaun dan tokoh-tokohnya berupaya mengembalikan harga diri dan martabat yang dianggap sebelumnya sempat terbenam lumpur sejarah.<sup>12</sup>

Pada awal masa kepemimpinan Harun Zain, banyak masalah yang dihadapi seperti pasifikasi daerah Sumatera Barat yang porak poranda seusai perang PRRI (1958-1961) dan belum efisiennya mekanisme kerja pemda, keuangan yang minim serta disintegrasi dan apatisme masyarakat Sumatera Barat yang kalah perang.<sup>13</sup> Dalam menghadapi masalah akibat peristiwa PRRI(1958-1961) Harun zain sebagai gubernur sumatera barat mempunyai kebijakan mengembalikan Harga diri atau mambangkik batang tarandam akibat peristiwa PRRI.

Hal tersebut dijelaskan dalam skripsi Arfan Ari Shandy,2008. Dengan judul ***Harun Zain: Strategi Mambangkik Batang Tarandam Dalam Kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat***. Dalam Skripsi ini mengkaji tokoh intelektual, pemimpin Sumatera Barat dan Minangkau di Era Orde Baru, yaitu Harun Zain sebagai sentral Permasalahan. Kajian ini di latar belakang oleh hadirnya harun zain sebagai seorang gubernur Sumatera Barat disaat daerah tersebut baru saja

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 101

<sup>12</sup> Shofwan Karim.”Kebergamanan di Minangkabau (1945-2017) dan respons ormas islam

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 101

mengalami pergolakan dan masyarakat diliputi oleh rasa trauma yang mendalam dan keinginan untuk membangkitkan harga diri dan memulihkan kehidupan masyarakat Pasca PRRI.<sup>14</sup>

Pemerintahan Gubernur Harun Zain (1966-1977) berjaya mewujudkan konsep membangun dan mengembalikan harga diri masyarakat Sumatera Barat yang porak poranda akibat peristiwa PRRI. Ketika tahun enam puluhan itu orang takut mengaku sebagai orang Minang, tetapi ketika Harun Zain berjaya dengan kebijakannya itu, mulai pulihlah harga diri orang Minang.<sup>15</sup>

Setelah tahun 1977 Harun Zain digantikan Oleh Azwar Anas yang menjadi Gubernur Sumatera Barat dari tahun 1977-1988. Dalam buku biografi karya Abrar Yusra dengan judul Azwar Anas: Teladan dari ranah minang. Pada halaman 301 ada kalimat yang mengatakan. Gong kebangkitan Sumatera barat dicanangkan oleh Harun Zain (1966-1977) dan berkembang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Gubernur Azwar Anas.<sup>16</sup>

Pada masa pemerintahan Azwar Anas pada saat Pelita III Sumatera Barat ditetapkan sebagai penerima anugerah Parasamya Purnakarya Nugraha yang menjadi sebuah kebanggaan, sebab Sumatera barat adalah provinsi satu-satunya di luar Jawa yang pernah memenangkannya. Serta Penyerahan penghargaan tersebut menurut harian Sinar Harapan “amat meriah dan jarang terjadi” karena saat itulah reuni terbesar masyarakat Minang yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Para

---

<sup>14</sup> Skripsi Arfan Ari Shandy, 2008. Dengan judul *Harun Zain: Strategi Membangkitkan Batang Tarandam Dalam Kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat*

<sup>15</sup> Abrar Yusra. Azwar Anas: Teladan dari ranah minang, hal 224

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 301

perantau minang, termasuk urang sumando, serata tokoh-tokoh terbaik minang baik tokoh pemerintahan, pengusaha maupun tokoh masyarakat, pulang ke Sumatera Barat dengan pesawat, mobil-mobil pribadi, dan bus. Hotel-hotel penuh yang membuat Kota Padang saat itu ramai.<sup>17</sup>

Pemahkotaan Sumatera Barat dengan hadiah kenegaraan Parasamya merupakan momen resmi berakhirnya secara definitif proses pasifikasi masyarakat Sumatera Barat pasca PRRI. Pulihnya masyarakat dari luka-luka perang dan pada saat yang sama merupakan momen terbukanya era baru ke masa depan yang cerah. Dalam konteks tertentu, Parasamya merupakan momen puncak yang menandai pulihnya hubungan dengan pemerintah pusat. Anugerah Parasamya tidak saja diterima sebagai sebuah pengakuan atas prestasi pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai hal yang prestesius, diakuinya keberadaan dan identitas masyarakat Minang di Indonesia. Yang membuat kiasan adat Mambangik Batang Tarandam tersebut sukses dilakukan oleh Masyarakat Sumatera Barat.<sup>18</sup>

Beberapa hal yang dilakukan oleh Gubernur Azwar Anas dimasa kepemimpinannya membangun Sumatera Barat tahun 1977-1988 yang penting untuk diteliti ialah: **Pertama**, Melakukan reorganisasi pemerintahan daerah seperti: .Menjalankan program pembangunan di daerah yang dibantu oleh tiga pembantu gubernur. Pada masa pemerintahan Azwar Anas diadakan jabatan pembantu gubernur sehingga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga pembantu gubernur. Mereka adalah Drs. Karseno, Pembantu Gubernur Wilayah I yang

---

<sup>17</sup> Abrar Yusra .Azwar Anas: Teladan dari ranah minang, hal 306

<sup>18</sup> Abrar Yusra .Azwar Anas: Teladan dari ranah minang, hal 309



meliputi Pasaman, Kotamadya Bukittinggi, Agam, Kotamadya Patakumbuh, dan 20 Kota. Kedua, Drs. Hasan Basri Durin, Pembantu Gubernur Wilayah II, yang meliputi Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kotamadya Padang, Kotamadya Padang Panjang, dan Tanah Datar dan yang ketiga, Drs. H.Hasan Basri, Pembantu Gubernur Wilayah III, yang meliputi Kotamadya Solok, Kabupaten Solok, dan Sawahlunto/Sijunjung. Mereka menjadi koordinator dalam melaksanakan kebijakan gubernur mengenai urusan wilayah dan bertanggung jawab kepada gubernur.<sup>19</sup> serta Mengubah Jorong menjadi desa dan Pariaman menjadi Kota Administratif

**Kedua**, Menyusun pola dasar pembangunan daerah Sumatera Barat dengan Cara berdialog dan mengadakan rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat. Karena hal tersebut sangat penting dalam proses pembangunan. yang akhirnya tersusun Pola dasar Pembangunan Sumatera Barat yaitu Sapta Karya Pembangunan Daerah Sumatera Barat.<sup>20</sup>

**Ketiga**, Turba ke nagarai-nagari melihat kehidupan langsung masyarakat Sumatera Barat yang merupakan tradisi yang dilakukan oleh Gubernur Harun Zain yang bertujuan untuk memotivasi pembangunan. Hal tersebut perlu dilakukan agar menggerakkan pemimpin masyarakat (ulama, niniak mamak, dan cerdik pandai) serta Bundo kanduang. Supaya sato sakaki (satu sekaki) dalam proses pembangunan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 252

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal 266

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal 232

**Keempat**, membuat program Manunggal Sakato yang merupakan adopsi dari Abri masuk desa. **Kelima**, Melaksanakan Event Nasional seperti MTQ Nasional 1983 untuk melihatkan kepada masyarakat bahawasanya Sumater Barat Mulai bangkit dan masih diperhitungkan di Indonesia dan menjadi daerah penting dalam Nasional.

Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji tentang *mambangik batang tarandam* yang merupakan kiasan adat Minangkabau yang menunjuk pada pemulihan kehormatan dan harga diri suatu kaum,<sup>22</sup> yang sebelumnya malu sebagai orang minang Akibat Peristiwa PRRI (1958-1961. dan Sumatera Barat sebagai Batasan spatialnya yang merupakan tempat terjadinya peristiwa PRRI . Sedangkan Batasan temporalnya yaitu Pada masa Gubernur Azwar Anas memimpin Sumatera Barat tahun 1977-1988. Jadi Penulis ingin mengkaji tentang ***Puncak Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pemerintahan Gubernur Azwar Anas tahun 1977-1988.***

## **B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Sejarah merupakan suatu studi yang unik dan berbeda dengan studi yang lainnya. Berbicara tentang sejarah tidak terlepas dari konteks waktu,tempat dan pelaku sejarah itu sendiri. Untuk itu dmalam penelitian ini penulis menetapkan

---

<sup>22</sup> Mambangik Batang Tarandam artinya membangkitkan batang yang terendam atau suatu hal yang berupa kebiasaan ataupun prestasi yang sudah lama hilang dan akan dimunculkan kembali. Biasanya dipakai untuk membangkitka adat istiadat/ kebiasaan lama yang hampir musnah di makan peradaban, yang memilik makna positif dan baik.

batasan spatial atau wilayah penelitian, yakni Sumatera Barat yang mana merupakan lokasi peristiwa PRRI (1958-1961)

Batasan temporalnya adalah Pada masa Gubernur Azwar Anas memimpin Sumatera Barat tahun 1977-1988. Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi Sumatera Barat sebelum pemerintahan Gubernur Azwar Anas ?
2. Bagaimana cara Gubernur Azwar Anas membangun dan memimpin masyarakat Sumatera Barat tahun 1977-1988?
3. Bagaimana perubahan yang terjadi setelah Gubernur Azwar Anas menjabat tahun 1977-1988?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

- a. Mendeskripsikan kondisi masyarakat Sumatera Barat sebelum pemerintahan Gubernur Azwar Anas.
- b. Mendeskripsikan cara Gubernur Azwar Anas membangun dan memimpin masyarakat Sumatera Barat tahun 1977-1988
- c. Mendeskripsikan perubahan yang terjadi setelah Gubernur Azwar Anas Menjabat tahun 1977-1988

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

- a) Menambah wawasan pemikiran terhadap daerah Sumatera Barat setelah terjadinya peristiwa PRRI.
- b) Menambah wawasan tentang cara pemerintah daerah Sumatera Barat membangun kembali daerahnya setelah terjadi traumatik akibat peristiwa PRRI.

#### **b. Manfaat Praktis**

Untuk menarik minat penelitian lain mengenai cara yang dilakukan pemerintah dan elit Sumatera Barat untuk membangun dan memimpin,serta mengembalikan harga diri masyarakat setelah terjadinya peristiwa PRRI serta perubahan yang terjadi setelah dilakukan pasifikasi tersebut terhadap masyarakat Sumatera barat tahun 1977-1988.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Studi Relevan**

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan untuk membantu penelitian ini, penulis terlebih dahulu melihat penelitian terdahulu untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.

Skripsi oleh Arfan Shandy,2008, dengan judul Harun Zain: *Strategi Membangkik Batang Tarandam Dalam Kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat*. Skripsi ini mengkaji tokoh intelektual, pemimpin Sumatera Barat dan Minangkau di Era Orde Baru, yaitu Harun Zain sebagai sentral permasalahan. Kajian ini di latar belakang oleh hadirnya Harun Zain sebagai seorang gubernur Sumatera Barat disaat daerah tersebut baru saja mengalami pergolakan dan

masyarakat diliputi oleh rasa trauma yang mendalam.<sup>23</sup> Keterkaitan skripsi tersebut dengan penelitian penulis karena sama-sama mempunyai objek kajian yang sama yang itu kepemimpinan, akan tetapi tokohnya berbeda

Skripsi Oleh: Frima Ayu Septya, 2008, dengan judul *11 Tahun Kepemimpinan Ali Sadikin : Perubahan Sosial Ekonomi Jakarta (1966-1977)*. Skripsi ini mengkaji mengenai kepemimpinan Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta tahun 1966 hingga 1977. Kepemimpinan Ali Sadikin merupakan tipe kepemimpinan problem solving (penyelesaian masalah) yang dilatari perubahan zaman pemerintahan orde lama ke Orde Baru. Penelitian ini menjelaskan kepemimpinan Ali Sadikin dalam penyelesaian permasalahan Sosial dan Ekonomi Jakarta di bawah rezim Orde Baru.<sup>24</sup> Keterkaitan skripsi tersebut dengan penelitian penulis sama-sama membahas kepemimpinan yang membawa perubahan besar di daerahnya.

*Masyarakat Minangkabau Pasca-PRRI*: dalam cerpen Ketika Jendral Pulang karya Khairul Jasmi cerpen ini merefleksikan bahwa peristiwa PRRI tahun 1958, menyebabkan generasi Minangkabau yang hidup sesudahnya tumbuh menjadi generasi yang kehilangan darah, penakut, merasa rendah diri, serta tidak percaya diri. Hal ini tergambar dari watak tokoh aku dan teman-temannya. Keadaan ini berlangsung dalam kurun waktu yang lama hingga generasi tersebut dewasa. Kedua, Pada era reformasi terjadi perubahan

---

<sup>23</sup> Skripsi Arfan Ari Shandy, 2008. Dengan judul *Harun Zain: Strategi Membangkik Batang Tarandam Dalam Kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat*

<sup>24</sup> Skripsi Oleh: Frima Ayu Septya, 2008. Dengan judul *11 Tahun Kepemimpinan Ali Sadikin : Perubahan Sosial Ekonomi Jakarta (1966-1977)*.

kehidupan masyarakat dari yang sebelumnya selalu dihantui ketakutan akibat trauma PRRI menjadi lebih pemberani. Hal ini diakibatkan selain karena faktor pergantian waktu yang menyebabkan generasi ini sudah melupakan PRRI dan menganggapnya sebagai sejarah masa lalu dan juga karena faktor pendidikan. Tokoh aku telah dewasa dan telah menjadi sarjana. Sedangkan tokoh Jendral tidak lagi ditakuti sebagai tentara.<sup>25</sup>

Karya-karya yang ditemukan mengenai kepemimpinan Azwar Anas dan ditemukan pembahasan yang relevan tentang kepemimpinan Azwar Anas yakni Buku biografi karya Abrar Yusra dengan judul *Azwar Anas: Teladan dari ranah minang*.

Buku ini membahas perjalanan hidup Azwar Anas semenjak masa kecil sehingga menjabat sebagai tentara, direktur, Gubernur Sumatera Barat serta menjadi ketua PSSI dan jabatan lainnya. Setelah menjabat menjadi Gubernur Sumatera Barat dalam buku ini banyak ditulis pendapat dari tokoh-tokoh yang dekat dengan Azwar Anas pada masa itu.

Kemudian Buku karya Mestika Zed, Edy Utama dan Hasril Chaniago yang berjudul “ **Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995**” mengupas keadaan Sumatera barat semenjak proklamasi. Selain itu ada buku karya Gusti Asnan yang berjudul “*Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*.. Buku ini memberikan informasi dan deskripsi tentang perubahan

---

<sup>25</sup> Ronidin, Volume 3 No 2, Juli 2010 MASYARAKAT MINANGKABAU PASCA-PRRI: Dalam cerpen Ketika Jendral Pulang karya Khairul Jasmi

administrative yang terjadi di Sumatera Barat sejak Zaman VOC hingga era reformasi.

## **2. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian diperlukan suatu patokan terhadap konsep hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan kepastian tentang sesuatu yang akan dibahas. PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia merupakan sebuah pemberontakan yang menjadikan Sumatera Barat sebagai basisnya. Munculnya pemberontakan ini sebagai akumulasi dari kekecewaan yang diakibatkan oleh daerah terhadap pemerintahan pusat di Jakarta. Kekecewaan tersebut diakibatkan oleh sentralisasi kekuasaan dan memunculkan kesenjangan pembangunan di segala bidang antara pusat dan daerah, di daerah pembangunan terutama di Sumatera Tengah tidak berjalan dengan baik.<sup>26</sup>

Lahirnya pemberontakan PRRI adalah salah satu dari berbagai pertentangan yang saling berhubungan dan dilatarbelakangi secara umum yaitu adanya kekecewaan terhadap kepemimpinan Sukarno yang bersifat otoriter. Kekecewaan itu didasarkan atas ketidaksenangan terhadap struktur pemerintahan saat itu yaitu sistem pemerintahan dengan kinerja birokrasi yang tidak efisien dan korup. Masyarakat Sumatera Barat menganggap kemerdekaan yang sudah dicapai tidak mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat secara umum. Kabinet yang dibentuk tidak berumur panjang, karena tidak dapat

---

<sup>26</sup> M.Yamin, *Dewan Banteng Contra Neo Ningrat*. Jakarta: LPPM Tanm Malaka. 2009. Hal.18

mengatasi permasalahan yang hanya mementingkan kepentingan partainya serta diri sendiri.

Adanya kesenjangan sosial yang mencolok pusat dan daerah antara atau Jawa dan di luar Jawa dilihat dari bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Suatu penilaian atas perbedaan-perbedaan ini menyebabkan ketegangan antara daerah- daerah di luar pulau Jawa dengan pemerintahan pusat di Jakarta. Munculnya kelompok yang mengatasnamakan PRRI yang pada dasarnya tidak ingin melepaskan diri dari pemerintahan Indonesia, tetapi hanya merupakan aksi protes terhadap perkembangan politik di pusat dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil. PRRI mempunyai basis di Kota Padang dan Bukiktinggi.

Orde Baru merupakan sebutan dari pemerintahan Soeharto yang berlangsung tahun 1966 hingga 1998. Lahirnya Orde Baru dimulai dari dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966.

Pembangunan menurut Siagian yaitu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Ginanjar Kartasasmita sederhananya pembangunan merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sondang. P. Siagian. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, Dan Strateginya. 1994



Pembangunan Sumatera Barat Dimasa Orde Baru difokuskan kepada Pembangunan Sumatera Barat dari segi Psikologis, mental dan fisik setelah kejadian PRRI. Pembangunan tersebut merupakan wujud dari sebuah kebijakan. Kebijakan itu sendiri diartikan sebagai rangkaian konsep beserta asas yang penting menjadi pedoman dalam melakukan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak seorang pemimpin.

Pemimpin adalah suatu lakon yang berperan dalam sistem tertentu. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan dan pengaruh yang dimiliki. Dari sejumlah pemimpin yang bersifat kultural di Indonesia ada yang dapat bekerja secara efektif melaksanakan tugasnya. Namun ada pula pemimpin yang tidak bisa menjalankan tugasnya.

Menurut Kartini Kartono Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.<sup>28</sup>

### **3. Kerangka Berfikir**

Pada intinya setelah Peristiwa PRRI menimbulkan trauma yang mendalam bagi masyarakat Sumatera Barat. Karena Peristiwa PRRI 1958-1961 telah memporak-porandakan kehidupan sosial politik, ekonomi dan budaya daerah

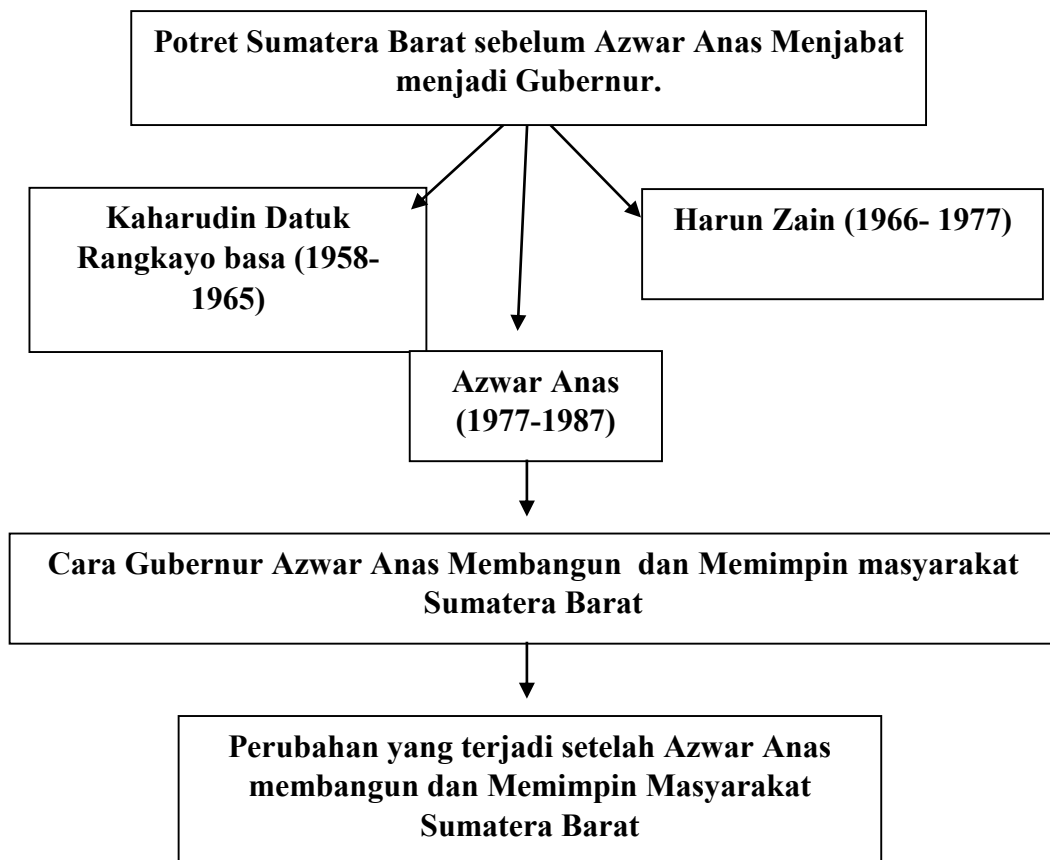
---

<sup>28</sup> Kartini Kartono Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu. 1994. Hal. 33

dan telah menimbulkan goncangan kultural dengan memukul kebanggaan dan rasa percaya diri orang Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan tentang ***Puncak Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada masa Pemerintahan Gubernur Azwar Anas tahun 1977-1988.***

Penulis tertarik terhadap cara-cara Azwar anas membangun dan memimpin masyarakat Sumatera Barat yang runtuh akibat Peristiwa PRRI dan penulis ingin mengetahui dampak perubahan yang terjadi setelah Azwar anas membangun Sumatera Barat. Dan ingin membandingkan dengan Kondisi masyarakat Sumatera Barat sebelum Azwar anas menjabat yaitu 1961-1977. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metodologi Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah yang menggunakan langkah penulisan sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menganalisis dan menguji secara kritis peninggalan masa lalu atau bisa dibilang merekonstruksi suatu peristiwa masa lalu. Menurut *Louis Gottschalk* ada empat tahap yang harus dijalani untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah yakni mengumpulkan sumber, kritik sumber, interpretasi dan akhirnya penulisan.<sup>29</sup> Keempat tahap tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk memahami buku-buku, dokumen-dokumen serta koran atau majalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini

#### **a. Pengumpulan Sumber (Heuristik)**

Dalam penelitian ini pengumpulan sumber dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku terkait PRRI, Serta segala buku yang berhubungan dengan Sumatera Barat Tahun 1961-1998 dan Data yang berhubungan dengan kepemimpinan Gubernur Azwar Anas. Disamping itu dari dokumen-dokumen yang dilakukan dengan mempelajari arsip-arsip yang berkaitan dengan Arsip Nasional yang banyak menampilkan bukti dari Mambangkik batang tarandam paska PRRI. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber sekunder yang diambil melalui studi pustaka, jurnal ilmiah, koran dan sumber primer seperti arsip, hasil wawancara.

---

<sup>29</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta, Ui Press, 1986, hal. 33-40

## **b. Kritik Sumber**

Kritik sumber merupakan tahap dalam penelitian sejarah setelah proses pengumpulan data. Kritik ini dilakukan untuk mengetahui otentik atau tidaknya suatu sumber atau otentisitas (kritik ekstern) dan kredibel atau tidaknya suatu sumber atau kredibilitas (kritik intern). Otentisitas artinya keaslian sumber, sedangkan kredibilitas artinya tingkat kepercayaan sumber untuk dapat dipercaya atau tidak sumber yang digunakan.

Dalam penelitian ini kritik intern lebih diperlukan daripada kritik ekstern. Kritik ekstern tidak perlu dilakukan karena keaslian bahan atau materi yang digunakan tidak perlu diragukan lagi. Kritik intern lebih diperlukan karena kebenaran sumber atau data masih perlu lagi dikaji apakah sumber atau data yang digunakan tersebut dapat dipercaya atau tidak kebenarannya. Dalam penelitian mengenai “Sumatera Barat pasca PRRI: Mambangik Batang Tarandam dimasa Pemerintahan Gubernur Azwar Anas tahun 1977-1988”.

Penulis melakukan perbandingan dari berbagai sumber yang berhasil didapat dan mencari kesesuaian dari sumber-sumber yang ada. Dengan membandingkan antara sumber satu dengan yang lainnya, maka akan diketahui keabsahan sumber-sumber yang ada tersebut. Untuk itu, perlu membandingkan sumber-sumber yang ada, yaitu antara sumber yang satu dengan sumber lainnya. Dengan membandingkan antara sumber satu dengan yang lainnya, maka akan diketahui kebenaran sumber-sumber yang ada tersebut.

### **c. Interpretasi**

Tahap ini merupakan tahap tafsiran terhadap sumber-sumber yang digunakan, kemudian dilakukan suatu uraian yang disertai dengan analisa-analisa. Interpretasi sering disebut subyektifitas. Untuk itulah subyektifitas dalam penulisan sejarah diakui tetapi sebesar mungkin untuk dihindari. Interpretasi itu ada dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis yang berarti menguraikan sedang sintesis berarti menyatukan.

Analisa sumber merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena dalam interpretasi ini terdapat unsur penafsiran terhadap sumber yang sudah dinilai kebenarannya. Hasil analisa akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu penelitian, karena sejarah sebagai ilmu pengetahuan memandang setiap peristiwa dalam hukum kausalitas selalu berusaha menemukan sebab suatu peristiwa yang kemudian akan memunculkan suatu akibat dari peristiwa yang telah terjadi.

Dalam proses interpretasi sejarah, peneliti harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data guna mengetahui peristiwa- peristiwa yang mana yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi, untuk mengetahui sebab-sebab dalam peristiwa sejarah memerlukan pengetahuan tentang masa sebelumnya atau peristiwa masa lalu, sehingga pada saat penelitian diketahui situasi secara umum baik itu pelaku, tindakan yang diambil dan tempat kejadian.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta, Ar-Rus Media, 2007, hlm.74

#### **d. Penulisan Sejarah /Historiografi**

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian sejarah, yaitu tahap penulisan sejarah atau historiografi. Penulisan sejarah tidak terlepas dari sumber- sumber yang terkait di dalamnya, untuk memberikan gambaran mengenai rangkaian suatu peristiwa dalam penelitian sejarah. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologis suatu peristiwa sangat penting, sehingga akan lebih mudah mengetahui kapan peristiwa tersebut sebenarnya terjadi. Karena itulah, alur pemaparan data harus selalu diurutkan secara kronologis, agar nantinya si pembaca dapat dengan mudah memahami.